Incar Kursi Parlemen, HTI Akui Dukung PBB di Pileg 2019

written by Harakatuna

Harakatuna.com. Jakarta. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membenarkan sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait keikutsertaan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

"Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB," kata Ismail seperti dilansir oleh *CNNIndonesia.com*, Rabu (14/3).

Menurut Ismail, kesepakatan antara HTI dan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu fokus tentang agenda untuk memperjuangkan aspirasi umat dan tegaknya syariat Islam di pemilu 2019 nanti.

"Jadi di atas aspirasi umat dan tegaknya syariah Islam kita bisa sepaham dan berjalan," kata Ismail.

PBB Provinsi Bengkulu sebelumnya sudah melakukan perekrutan calon legislator dari kader HTI dan Front Pembela Islam (FPI).

Namun demikian, Ismail masih belum mau merinci secara detail nama-nama kader HTI yang akan menjadi calon legislatif (caleg) di parlemen nanti. Ismail hanya memastikan dukungan kepada PBB untuk kepentingan mengisi kursi parlemen sudah dibicarakan.

"Kalau sampai detail nama caleg belum ya. Tapi untuk dukungan ya ke PBB," tegas Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan pemahaman soal demokrasi yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan. Menurutnya demokrasi yang dipahami keduanya adalah alat perjuangan untuk menegakkan aspirasi umat Islam.

Pernyataan ini diutarakan Ismail sekaligus membantah wacana soal masuknya kader HTI ke partai politik dan parlemen nanti bertentangan dengan sistem khilafah yang mereka usung.

"Jadi soal demokrasi kita sudah saling memahami," kata Ismail.

Harus Ganti Rezim

Terkait pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti, HTI masih belum menentukan sikap. Walau begitu, Ismail mengakui jika rezim Joko Widodo harus segera

diganti.

Sikap politik HTI di level pilpres nanti, kata Ismail, jangan sampai memilih pemimpin yang anti kepada ulama, mendukung pembubaran ormas Islam,

kriminalisasi terhadap ulama, dan mendukung penista Alguran dan Islam.

"Jadi rezim Jokowi jangan sampai berkuasa lagi," kata Ismail.

Kendati demikian, Ismail mengatakan HTI belum mau terlibat di dalam penentuan

nama capres yang sesuai dengan aspirasi perjuangan umat Islam tersebut.

Termasuk dengan rencana gerakan nasional penyelamat fatwa (GNPF) ulama dan

presidium alumni 212 yang akan menggelar konvensi capres penantang Jokowi.

"Soal capres kita belum," tutur Ismail.

Sumber: CNN